

DAFTAR PUSTAKA

- BPJS Kesehatan. (2014). Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. *BPJS Kesehatan*, 1–48.
- BPK. (2007). *MEKANISME PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN*. 1–5.
- Dwicha. (2019). *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pending Klaim Kepesertaan BPJS Di RSUD Dr. Kariadi Semarang Tahun 2016*. 269, 6–26.
- Herbayuanto, H. (2018). PERBEDAAN PERSEPSI ATAS KUALITAS PELAYANAN ANTARA PASIEN RAWAT INAP PENGGUNA BPJS DENGAN NON BPJS DI RSUD KANJURUHAN. *Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3), 248–253*.
- Icha, Suhadi, & Harun. (2020). *IDENTIFIKASI PENYEBAB PENGEMBALIAN BERKAS KLAIM BPJS RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAHTERAMAS PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020*. 1(2), 61–70.
- Kurniyawati, E., & Pribadi, F. (2018). Evaluasi Klaim Yang Tidak Layak Bayar Layanan Non -Jiwa Tahun 2016 Di Rumah Sakit Prof Dr. Soeroyo Magelang Mental. *Ist International Conference on Health Administratiton and Policy*, 1–6.
- Oktamianiza, Rahmadhani, Yulia, Y., & Putri, H. M. (2021). Literatur Riview Tentang Faktor Penyebab Klaim Tidak Layak Bayar BPJS Kesehatan Di Rumah Sakit Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Perekam Dan Informasi Kesehatan Imelda (JIPIKI)*, 6(1), 83–90. <https://doi.org/10.52943/jipiki.v6i1.487>
- Otifa, V., Meliala, A., & Hendrartini, Y. (2016). Klaim Tidak Layak Bayar Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Layanan Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. Soerojo, Magelang. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 19(04), 22–27.
- Peraturan BPJS Kesehatan No 7. (2018). PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN RAWAT JALAN EKSEKUTIF DI RUMAH SAKIT. *Nature Methods*, 7(6), 2018. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26849997><http://doi.wiley.com/10.1111/jne.12374>
- Permenkes. (2013). *PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL*.
- Permenkes. (2014). *PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM INDONESIA CASE BASE GROUPS (INA-CBGs)*.
- Putri, A. F., & Budi, S. C. (2020). Hubungan Kelengkapan Persyaratan Klaim Terhadap Persetujuan Klaim Oleh Verifikator Bpjs Di Rsup Dr. Soeradji Tirtonegoro. *Prosiding" Seminar Rekam Medis Dan ...*, 1–10. <https://publikasi.apfirmik.or.id/index.php/procsemarang/article/view/55>

- Rifka. (2020). *Analisis Penyebab Pending dan Tidak Layak Berkas Klaim Rawat Jalan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RSKIA Sadewa Yogyakarta RIFKA SITI NUR A, Nuryati, S.far., M.P.H.*
- Valentina, & Niat Sehati Halawa, M. (2019). Analisis Penyebab Unclaimed Berkas Bpjs Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia (Rsu Ipi) Medan. *Jurnal Ilmiah Perekam Dan Informasi Kesehatan Imelda (JIPIKI)*, 3(2), 480–485. <https://doi.org/10.52943/jipiki.v3i2.66>